Radar Bali

OEMAR BAKRIE

Dewan Usulkan Gaji GTT Dinaikkan

BANGLI - Rendahnya gaji yang diterima para Guru Tidak Tetap (GTT) dinilai masih jauh dari kata sejahtera dan hal ini juga dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kualitas pendidikan di Kabupaten Bangli. Akibat hal ini dewan Bangli mengusulkan agar gaji para GTT di Bangli agar dinaikan. Terlebih upah minimum yang diterima para GTT ini mengemban tanggung jawab yang sangat berat.

Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles pada Minggu (29/11) kemarin mengatakan kenaikan gaji guru non PNS ini sudah sepatutnya dinaikan. Pasalnya peran GTT dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan hampir sama dengan PNS dan juga untuk kemajuan pendidikan di Bangli. "Para GTT ini harus diperhatikan, karena mereka (GTT, red) memiliki peran penting dalam dunia pendidikan," ujarnya.

Lebih lanjut politisi dari fraksi partai Demokrat ini menjelaskan kenaikan gaji para GTT ini bisa merangsang kinerja di dunia pendidikan. Setidaknya ada perhatian pemerintah melalui kenaikan upah. Tak hanya para GTT tapi juga pada Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga harus diperhatikan. Namun demikian kenaikan gaji ini juga dilakukan melalui pengawasan intensif. "Saat ini upah yang diterima para GTT ini hanya Rp 700 jadi harus dinaikan menjadi Rp 1 juta atau disesuaikan dengan UMK senilai Rp 1,6 juta. Tapi itu juga harus dengan pertimbangan sesuai kemampuan daerah," pintanya.

Terkait usulan yang diajukan pihaknya sempat disampaikan saat menggelar rapat APBD 2016 beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih berupa tahap pengkajian oleh pihak eksekutif. "Semoga saja usulan ini bisa mendapat respon positif, agar para GTT dan PTT bisa lebih sejahtera," harapnya. **(zul/gup)**

Edisi : Senin, 30 NOV 2015

Hal : 29

Radar Bali

Tersangka BPD Bali "Diselamatkan"

Dijadikan Penggelapan, Dilempar ke Polda Bali

DENPASAR – Teka-teki permainan kasus di Kejati Bali semakin terkuak. Sebelumnya, beberapa kasus sudah ditutup dengan bau amis. Kali ini ada kasus yang jelas-jelas kasus korupsi di era Aspidsus Kejati Bali Gede Putu Sudharma, sekarang akan diselamatkan dengan diarahkan menjadi pidana umum yaitu penggelapan. Dengan kondisi ini, ancaman hukuman jelas lebih ringan.

Informasi yang dirangkum koran ini, desas-desus permainan kasus yang dimaksud adalah kasus korupsi BPD Bali. Sekadar mengingatkan, pada saman Aspidsus Sudharma kasus ini dipastikan korupsi. Bahkan setelah terbongkar di media, cukup empat hari Sukarja yang menilep deposito di BPD Bali langsung tersangka. "Sangat gampang menjadikan kasus ini kasus korupsi," tegas Sudharma saat itu.

Belakangan ketika dipegang komando oleh Aspidsus Erna Norma banyak bermunculan SP-3 dan kasus yang ditutup, atau dirancang dengan pola janggal. Yang terbaru adalah kasus BPD Bali. "Kasus ini akan jadi penggelapan, sehingga ancaman hukumannya jauh lebih ringan. Dan Kejaksaan tidak bisa menangani lagi, lantaran pidana umum proses penyidikan ada di Polisi," jelas sumber koran ini di Kejati, kemarin.

Selain itu, kejanggalan bahwa Kejati memang sempat membekukan kasus ini dengan mengatakan bahwa menunggu penjelasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Wilayah Bali juga sudah terbongkar. Lantaran pihak OJK memastikan sudah 31 Juli 2015 lalu, sudah memberikan keterangan. Namun selalu pihak Kejati "mengkambing hitamkan" OJK dengan mengatakan menunggu keterangan OJK.

Kondisi ini sudah dibantah oleh Humas OJK Robert Sianipar. "Kami sudah berikan penjelasan 31 Juli lalu, kok bisa tetap kami dibilang belum memberikan penjelasan," jelas Robert.

Atas kejanggalan kasus ini, Kasi Penyidikan dibidang Pidsus Kejati Bali Akmal Kodrat bisa dikonfirmasi. Dia adalah orang yang selalu menuding masih menunggu OJK, bahkan sudah beberapa kali memberikan alasan seperti itu. Ketika ditanyakan bahwa OJK sudah memberikan penjelasan. Akmal Kodrat langsung mengakui kesalahan. "Maaf-maaf, kami salah. Bukan itu maksud kami. OJK memang sudah memberikan penjelasan, saya keliru. Maklum saya bukan Kasipenkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum, Humas maksudnya)," kilah Akmal seenaknya.

Dia juga mengakui bahwa perkembangan kasus ini ada yang baru. Yaitu kasus ini rencananya akan diserahkan ke Polda Bali. "Kami akan serahkan ke Polda Bali," sebutnya. Kok bisa? Ternyata benar, memang kasus ini diarahkan untuk menjadi penggelapan. "Karena dalam kasus ini ada penggelapannya, sehingga kami tidak bisa menangani, harus dipolda, kami tidak ada penyidikan kasus pidana umum," sebutnya.

Artinya diselamatkan menjadi penggelapan? Dia mengatakan, dalam kasus ini ada unsur penggelapan, namun tetap dia mengaku masih yakin ada kasus korupsinya. Tetapi apakah nanti akan murni ditangani Polda atau penggelapannya saja, sedangkan indikasi korupsinya ditangani jaksa. "Akan lebih bagus kalau penggelapan dan korupsinya ditangani polda," pungkasnya, sambil bergegas meninggalkan koran ini, beberapa waktu lalu. **(art/han)**

Edisi : Minggu, 29 Nov 2015

Hal : 24